

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Perekonomian Indonesia didorong oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor. Tetapi indikator yang paling mendasar dalam pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang harus menjadi prioritas karena keduanya sangat berkaitan erat dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu provinsi di Indonesia adalah Provinsi Aceh. Provinsi yang terletak di ujung Pulau Sumatera ini pernah mengalami konflik selama beberapa dekade. Setelah konflik yang terjadi yang terjadi dari tahun 1976-2005 akhirnya dilakukan kesepakatan damai antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh dan kemudian dibentuklah Undang-Undang Pemerintah Aceh. UUPA dibentuk sebagai wujud perhatian pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh. UUPA dibentuk dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera yang diperlukan bukan hanya pembangunan infrastrukturnya tetapi juga

pembangunan manusianya. Pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam mewujudkan pembangunan. Tolok ukur utama dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan adalah pendidikan dan kesehatan, ekonomi (Ananta, 2013).

Badan Pusat Statistik (2020) mendefinisikan IPM sebagai indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Nilai IPM berupa angka dengan kisaran angka 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka menunjukkan capaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu: rendah jika nilai IPM < 60, sedang nilai IPM 60 – IPM < 70, tinggi nilai IPM 70 – IPM < 80, dan kategori sangat tinggi jika nilai IPM ≥ 80.

Gambar 1.1. Indeks Pembangunan Manusia Aceh 10 Tahun Terakhir
Sumber : www.aceh.bps.go.id (diolah)

IPM Aceh berdasarkan BPS terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Gambar 1.1. dapat dilihat nilai IPM Aceh dalam 10 tahun terakhir. Nilai IPM Aceh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Nilai IPM dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berada pada kategori sedang. Kemudian memasuki tahun 2017 nilai IPM mengalami kenaikan dan berada pada kategori tinggi. Hal ini menandakan nilai pembangunan manusia di Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Kondisi IPM Aceh dibandingkan dengan IPM nasional dalam kurun waktu 2017-2021 dapat digambarkan dalam grafik di bawah. Berdasarkan data dari BPS Aceh, IPM Indonesia pada tahun 2020 berada pada angka 71,94, mengalami peningkatan sebanyak 0,03% dibandingkan IPM tahun sebelumnya yaitu 71,92. Angka IPM tersebut menempatkan Aceh sebagai daerah dengan IPM di atas rata-rata nasional, di mana IPM Aceh pada tahun 2020 berada pada angka 71,99.

Gambar 1.2. Perbandingan IPM Aceh dengan Nasional

Sumber: www.bps.go.id (diolah)

Perbandingan IPM dengan provinsi lainnya yang berada di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Tabel 1.1 di mana dapat dijelaskan bahwa nilai IPM Aceh berada di peringkat keempat dibandingkan dengan 10 provinsi lainnya di Pulau Sumatera di mana Kepulauan Riau berada di posisi pertama. Berdasarkan Tabel 1.1 juga dapat dilihat bahwa rata-rata IPM di Pulau Sumatera dalam periode 2019-2021 masih mengalami kenaikan walaupun telah terjadi Covid-19. Hanya Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Selatan yang mengalami penurunan nilai IPM selama terjadi Covid-19, tetapi nilainya mengalami peningkatan lagi pada tahun 2021.

Tabel 1.1
Data Indeks Pembangunan Manusia Daerah di Pulau Sumatera
Periode 2017-2021

No.	Provinsi	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	KEP. RIAU	74.45	74.84	75.48	75.59	75.79
2.	RIAU	71.79	72.44	73.00	72.71	72.94
3.	SUMATERA BARAT	71.24	71.73	72.39	72.38	72.65
4.	ACEH	70.60	71.19	71.90	71.99	72.18
5.	SUMATERA UTARA	70.57	71.18	71.74	71.77	72.00
6.	KEP. BANGKA BELITUNG	69.99	70.67	71.30	71.47	71.69
7.	BENGKULU	69.95	70.64	71.21	71.40	71.64
8.	JAMBI	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63
9.	SUMATERA SELATAN	68.86	69.39	70.02	70.01	70.24
10.	LAMPUNG	68.25	69.02	69.57	69.69	69.90

Sumber: www.bps.go.id (diolah)

BPS menyatakan bahwa nilai IPM Aceh meningkat pada tahun 2020. Nilai IPM Aceh pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan nilai IPM Aceh pada tahun 2019 dengan angka 71,90. Peningkatan nilai IPM Aceh ini disebabkan karena adanya peningkatan komponen pembentuk IPM di Aceh. Adapun keempat komponen yang dimaksud tersebut adalah indikator umur harapan hidup atau rata-

rata usia tertua masyarakat, indikator harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat standar hidup layak atau pendapatan per kapita masyarakat.

Peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia Aceh dari tahun ke tahun tidak dicapai dengan mudah. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Aceh agar kualitas hidup manusia atau masyarakat di Aceh bisa meningkat. IPM merupakan bukti nyata bagi indikator penting keberhasilan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan pembangunan manusia di Aceh. Upaya Pemerintah Aceh dalam menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran serta meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berperan serta dalam meningkatnya nilai IPM Aceh.

Salah satu pencapaian Pemerintah Aceh dalam IPM adalah berdasarkan data statistik pada BPS, Kota Banda Aceh pada tahun 2021 berhasil menempati posisi kedua terbaik nasional dengan nilai IPM 85,71 dengan kategori IPM sangat tinggi. Posisi pertama dengan nilai IPM terbaik diduduki oleh Yogyakarta dengan nilai IPM 87,18. Pencapaian Kota Banda Aceh ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama seluruh pihak dalam mewujudkan visi misi Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah.

Dalam mewujudkan pemerintah yang baik maka diperlukan adanya *good governance*. Praktek *good governance* ini mensyaratkan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan adanya pemberian kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi pada penyelenggaraan pemerintah dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Sebagai contoh untuk Provinsi Aceh terdapat web khusus untuk mengetahui realisasi belanja yang sudah

dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui seberapa besar belanja yang sudah dianggarkan sudah terealisasi.

Adanya pelaporan informasi keuangan melalui web merupakan salah satu upaya yang efektif dan efisien dalam mewujudkan *good governance*. *Good governance* diperlukan dalam rangka mencapai tujuan nasional salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada akhirnya dengan adanya *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat juga meningkatkan nilai IPM di daerah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk di daerah dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Sikayena (2022) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi IPM diantaranya: harapan hidup, tingkat kematian bayi, rasio kematian ibu, pendaftaran sekolah – primer, pendaftaran sekolah – sekunder, kualitas kelembagaan, urbanisasi, GDP, pengeluaran pemerintah, inflasi, penanaman modal asing dan keterbukaan. Fadilah (2018) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi IPM diantaranya: belanja pemerintah untuk pendidikan, belanja pemerintah untuk kesehatan, sektor-sektor ekonomi dan belanja pemerintah untuk infrastruktur. Menurut Arisman (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPM adalah: jumlah penduduk, pendapatan per kapita,

inflasi dan tingkat pengangguran. Selanjutnya Shah (2016) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai IPM, diantaranya adalah: harapan hidup, rata-rata literasi dewasa (15+), GDP per kapita, tingkat kesuburan, indeks gini dan inflasi. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi IPM, dalam hal ini penulis mengambil faktor-faktor sebagai berikut: belanja pendidikan, belanja kesehatan, pendapatan asli daerah, pendapatan regional domestik bruto dan inflasi.

Adapun alasan penulis mengambil kelima faktor tersebut adalah karena belanja pendidikan, belanja kesehatan dan PDRB merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi perhitungan nilai IPM, PAD yang sebagai penerimaan asli suatu daerah apakah mempengaruhi nilai IPM, dan inflasi yang secara hipotesis berpengaruh negatif terhadap IPM apakah benar-benar mempengaruhi nilai IPM?

Belanja pendidikan adalah belanja pemerintah dalam bidang pendidikan. Mangkoesoebroto dalam Demak (2020) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi permasalahan pada bidang tersebut. Anggaran pendidikan merupakan anggaran yang paling besar jika dibandingkan dengan anggaran pada sektor lainnya. Dengan anggaran yang besar ini diharapkan mampu menjadi pendukung untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Selain belanja pendidikan, terdapat belanja kesehatan yang merupakan salah satu belanja pemerintah yang menjadi salah satu kebutuhan utama

masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Ketersediaan belanja infrastruktur seperti sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang memadai dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu faktor penting dalam kinerja perekonomian daerah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang sehingga dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Yanfi (2022) mengungkapkan belanja pemerintah pusat bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, realisasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan berpengaruh negatif tetapi kurang signifikan terhadap IPM, sementara belanja pemerintah pusat bidang kesehatan berpengaruh secara positif dan tidak signifikan, dan belanja pemerintah daerah untuk bidang kesehatan berpengaruh secara positif dan kurang signifikan terhadap pembentukan variabel IPM.

Sikayena, et al (2022) menjelaskan dalam *Efficiency of public spending on human capital in Africa* menemukan bahwa efisiensi pengeluaran publik untuk kesehatan dan pendidikan tidak efisien. Namun diketahui bahwa efisiensi pengeluaran publik untuk kesehatan ternyata lebih tinggi daripada efisiensi pengeluaran publik untuk pendidikan. Variabel seperti pengeluaran pemerintah dan keterbukaan perdagangan keduanya berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja publik untuk kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya Muliza, et al; (2010) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk belanja pendidikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peneliti berpendapat bahwa belum signifikannya pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh karena masih adanya disparitas pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian yang dilakukan menggunakan regresi data panel.

Jumlah Belanja pendidikan dan belanja kesehatan Provinsi Aceh selama kurun waktu 10 tahun dapat dilihat dalam Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Belanja Pendidikan dan
Belanja Kesehatan di Aceh Periode 2012-2021

Tahun	Belanja Pendidikan (Jutaan Rupiah)	Belanja Kesehatan (Jutaan Rupiah)
2012	871,104	945,780
2013	809,091	1,314,768
2014	464,139	317,383
2015	2,361,832	1,775,662
2016	2,658,726	1,806,011
2017	4,188,322	2,272,770
2018	4,514,839	2,482,432
2019	5,959,278	4,462,297
2020	5,023,563	4,042,862
2021	6.225.942	4.899.166

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (data diolah)

Mengingat pentingnya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengalokasikan belanja sektor pendidikan menjadi lebih besar lagi dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2016 sampai dengan 2019 nilai belanja pendidikan Aceh terus mengalami peningkatan. Tetapi angka tersebut kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 ini tahun dimulai terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi bukan hanya di Aceh dan di Indonesia tetapi juga

terjadi di seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2021 bersamaan dengan semakin baiknya ekonomi dunia setelah sebelumnya terkena dampak Covid-19 dan berdampak pada lebih baiknya ekonomi Indonesia belanja pemerintah untuk sektor pendidikan juga mengalami peningkatan kembali. Pada tahun 2021 belanja pendidikan Aceh tercatat Rp. 6.225.942.499.397,-.

Maulana dan Bowo (2013) menyatakan bahwa Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Teknologi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian Monsef, et al (2011) menyatakan bahwa Teknologi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Lain halnya dengan belanja kesehatan, pada tahun 2012 nilai belanja kesehatan berada pada angka Rp. 945.780.000.000,- kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.314.768.000.000,-. Tetapi kemudian mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2014 menjadi Rp. 317.383.000.000,-. Tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 nilai belanja kesehatan mengalami peningkatan dan terus terjadi sampai tahun 2019. Sama halnya dengan belanja pemerintah untuk sektor pendidikan, belanja pemerintah untuk sektor kesehatan juga mengalami penurunan pada tahun 2020 saat terjadinya Covid-19. Belanja kesehatan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan belanja kesehatan Aceh tercatat menjadi Rp. 4.899.166.257.007.

Selain faktor pendidikan dan kesehatan, IPM juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila

unsur-unsur yang mempengaruhi tersebut dapat ditingkatkan. Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Penelitian yang dilakukan oleh (Meylina: 2013) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Bhakti: 2012) menemukan bahwa kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Salah satu faktor selain pendidikan dan kesehatan diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber dana yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di suatu daerah. Tingkat Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi tingkat IPM yang berarti semakin besar atau kecil PAD di suatu wilayah maka dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai IPM yang dicapai. Peningkatan PAD oleh Pemerintah daerah menunjukkan bahwa daerah memiliki sumber dana yang cukup dan mampu untuk membiayai belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung IPM, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap IPM.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hobrouw (2021) dan Pradnyantari (2017) yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya PAD di suatu daerah maka memungkinkan pemerintah daerah memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik, membiayai pembangunan daerahnya dan pada

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan manusia di daerah tersebut yang diukur dengan IPM.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi IPM adalah PDRB. Menurut Izzah (2021) PDRB secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menandakan bahwa setiap adanya peningkatan PDRB maka akan menaikkan nilai IPM daerah tersebut. Nadila (2022) menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Peningkatan pendapatan masyarakat mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan domestik berarti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia juga akan meningkat.

Inflasi juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap IPM. Naiknya tingkat inflasi bisa menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan tingkat kesejahteraan pun bisa terganggu. Pangesti (2018) mengungkapkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap IPM. Kestabilan inflasi merupakan salah satu penentu pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kiha (2021) menjelaskan bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini menandakan bahwa terjadinya masalah pada perekonomian ditandai dengan adanya peningkatan harga-harga barang secara umum dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya inflasi di suatu daerah mempengaruhi daya beli masyarakat dan dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi menurun yang pada akhirnya berpengaruh pada nilai indeks IPM.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penulis juga ingin meneliti daerah mana di Provinsi Aceh yang memiliki nilai IPM tertinggi dan nilai IPM terendah. Penelitian ini selain menguji pengaruh Belanja Pemerintah untuk Pendidikan, Belanja Pemerintah untuk Kesehatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja pemerintah untuk pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
2. Apakah belanja pemerintah untuk kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
4. Apakah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
5. Apakah inflasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja pemerintah untuk pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja pemerintah untuk kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan dapat memperkuat pondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Manajemen Keuangan Daerah

khususnya optimalisasi pemanfaatan dana-dana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan bagi penelitian terkait yang lainnya. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode atau alat analisa yang lebih baik dan sempurna.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah bahan literatur yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan dana yang dikelola oleh daerah.

2. Secara praktis

Bagi praktisi atau instansi pemerintah, penelitian diharapkan memberikan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Daerah, khususnya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sebagai objek penelitian dalam upaya mendorong perkenomian daerah sehingga proses kebijakan desentralisasi fiskal ke daerah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.